



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2009 - 2010
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	6 (Enam)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Hari/Tanggal	:	Rabu, 14 April 2010
Pukul	:	19.40 – 23.00 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Mahyuddin NS, Sp.Og./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	Pembahasan perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA 2010
Hadir	:	39 orang dari 49 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 19.40 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. Mahyuddin NS, Sp.Og., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat ditutup oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. Mahyuddin NS., Sp.Og.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat dan dilanjutkan pemaparan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta menampung pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN-P TA 2010 Kemenbudpar belum memperoleh pagu definitif, namun demikian Kemenbudpar memandang perlu untuk mengajukan usulan anggaran pada RAPBN-P TA 2010 sebesar Rp 248,250 M untuk: (i) pengelolaan keragaman budaya, (ii) pengelolaan kekayaan budaya, (iii) pengembangan pemasaran, (iv) pengembangan kemitraan, (v) penetapan pemerintahan yang baik, dan (vi) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
 2. Komisi X DPR RI akan mempertimbangkan usulan tambahan pagu anggaran RAPBN-P TA 2010 Kemenbudpar dengan program prioritas utama pada pengembangan keragaman budaya dan pengelolaan kekayaan budaya dalam rangka pembentukan karakter dan jati diri bangsa termasuk perlindungan dan penemuan baru cagar budaya melalui pembentukan RUU tentang Cagar Budaya.

3. Komisi X DPR RI mendesak Menbudpar untuk meningkatkan pemasaran pariwisata secara aktif dan komprehensif, salah satunya melalui program promosi yang terukur antara pagu yang teranggarkan dengan capaian penerimaan devisa negara. Selanjutnya usulan tambahan pagu sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas akan diusulkan oleh Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI.
4. Komisi X DPR RI dan Menbudpar sepakat bahwa pendalaman tambahan pagu usulan RKA-K/L RAPBN-P TA 2010 Kemenbudpar akan dibahas dalam RDP dengan Kemenbudpar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, setelah ada kepastian pagu indikatif dari Badan Anggaran DPR RI utamanya untuk mendalami besaran anggaran dan prioritas program/kegiatan didasarkan pada prioritas nasional, Kepres, kebijakan Kemenbudpar, dan peraturan perundang-undangan terkait.

III. Rapat diakhiri pada pukul 23.00 WIB

Jakarta, 14 April 2010
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
K E T U A,



PROF. DR. MAHYUDDIN NS. Sp.Og.